

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan merupakan pendorong utama terbentuknya modal manusia yang mampu memberikan peluang untuk mempercepat dan mempermudah pertukaran informasi dalam aktivitas ekonomi, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi interaksi sosial. Kemajuan ilmu pengetahuan juga dapat memperluas ruang lingkup produksi, memperluas pengetahuan dan pemahaman, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Todaro & Smith, (2011), pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan manusia dalam suatu negara untuk membangun agar mempunyai kapasitas untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan adalah proses perubahan sosial yang direncanakan, melibatkan berbagai dimensi yang bertujuan untuk mencapai kemajuan pembangunan nasional, ekonomi dan peningkatan kualitas modal manusia sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Dalam perspektif ilmu ekonomi, Todaro & Smith, (2011) mengungkapkan bahwa pembangunan merupakan usaha dalam mencapai pertumbuhan pendapatan perkapita berkelanjutan, sehingga negara mampu meningkatkan produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Terdapat tiga kerangka teoritis dalam pemahaman pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan, dan ketergantungan (Tikson, 2005).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan yang bersifat berkelanjutan dalam kondisi perekonomian suatu negara menuju perbaikan dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penting untuk mengevaluasi kinerja suatu perekonomian dalam melakukan hal analisis hasil dari pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu negara. Kondisi perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila dalam proses produksi barang dan jasa mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi suatu kondisi yang mutlak dalam membangun kesejahteraan ekonomi. (Tambunan, 2001).

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur dalam suatu negara untuk meningkatkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Menurut Todaro & Smith, (2011) dalam pembangunan ekonomi, modal manusia (*human capital*) atau sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menentukan kecepatan kemajuan suatu bangsa, sedangkan pembangunan modal manusia sendiri dipengaruhi oleh permasalahan dalam sistem pendidikan, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan dan taraf hidup, peningkatan kemampuan, serta pemberian kebebasan individu.

Menurut Todaro & Smith, (2011) terdapat tiga faktor yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertama, akumulasi modal melibatkan segala bentuk investasi baru dalam aspek tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui perbaikan di sektor kesehatan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan kerja. Kedua, pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan angkatan kerja, dan yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran dalam menggambarkan perkembangan ekonomi suatu negara dalam kurun waktu tertentu dari tahun sebelumnya (Sukirno, 2006). Dalam teori pertumbuhan ekonomi dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi per kapita dalam jangka waktu yang panjang dan penjelasan interaksi antar faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Perkembangan ekonomi dalam suatu negara dapat diukur menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan nilai pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu. Hasil produksi diukur dengan menggunakan konsep nilai tambah (*value added*) yang digunakan oleh sektor-sektor ekonomi wilayah tersebut secara keseluruhan yang dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB).

Produk Domestik Bruto (PDB) disajikan dalam dua konsep, yaitu PDB harga berlaku dan PDB harga konstanta. PDB harga berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode waktu berdasarkan harga yang berlaku pada periode tersebut. Sedangkan PDB harga konstan (*rill*), merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga berlaku memberikan gambaran struktur perekonomian berdasarkan sektor usaha. Sementara Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga konstanta memberikan gambar tingkat pertumbuhan ekonomi dengan pencapaian pembangunan dalam periode tertentu. Penghitungan tingkat pertumbuhan ekonomi dari Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga konstan bertujuan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar merupakan pertumbuhan volume barang dan jasa, bukan pertumbuhan ekonomi yang masih mengandung kenaikan atau penurunan harga (*inflasi*).

Tabel 1 PDB dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2015-2022

| Tahun | PDB (Miliar Rp)   | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|-------|-------------------|-------------------------|
| 2015  | 8.982.511.000,00  | 4,88                    |
| 2016  | 9.433.034.000,00  | 5,03                    |
| 2017  | 9.912.749.000,00  | 5,07                    |
| 2018  | 10.034.781.000,00 | 5,17                    |
| 2019  | 10.125.347.000,00 | 5,02                    |
| 2020  | 10.722.999.000,00 | -2,07                   |
| 2021  | 11.120.077.000,00 | 3,70                    |
| 2022  | 11.710.397.000,00 | 5,31                    |

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan Tabel 1 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2015 hingga 2022. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 5,31% di antara tahun 2015 hingga 2022. Namun pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan karena mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,07%. Selain itu,

pertumbuhan ekonomi di Indonesia sempat mengalami kondisi tidak normal pada tahun 2020-2021, dikarenakan tahun tersebut Indonesia terdampak Covid-19.

Perekonomian Indonesia ikut terdampak dengan adanya wabah Covid-19 yang berasal dari Kota Wuhan, China. Wabah Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Kasus Covid-19 tertinggi terjadi pada akhir bulan Januari yaitu sebanyak 14.528 kasus (Kemenkes RI, 2020). Gelombang kedua kasus Covid-19 terjadi pada bulan Juni-Juli 2021 yang terjadi karena dampak varian Delta. Penyebaran kasus Covid-19 terjadi dengan sangat cepat dengan total laporan kasus sebanyak 165.887 dengan 7.169 kematian di 34 Provinsi Indonesia (Kemenkes RI, 2020).

Akibat dari wabah Covid-19 ini berdampak juga bagi perekonomian global. Perekonomian dunia diprediksi oleh JP Morgan akan mencapai -1,1% dan diprediksi -3% oleh IMF ditahun 2020. Prediksi-prediksi perekonomian ini sangat membuat khawatir seluruh masyarakat di dunia (Iskandar *et al.*, 2020). Salah satu kebijakan yang diambil dari Pemerintah Indonesia yaitu dengan memberlakukan *social distancing*, *psysical distancing* bagi seluruh masyarakat Indonesia atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan pada Maret 2020 (Hadiwardoyo, 2020). Meskipun kebijakan tersebut telah berlaku, namun masih terdapat kantor bahkan pusat-pusat perbelanjaan yang masih beroperasi sehingga mengakibatkan kerumunan. Pemberlakuan PSBB dinilai kurang efektif dalam mengurangi kasus Covid-19, dikarenakan dampak dari kebijakan tersebut menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi semua sektor, termasuk terganggunya produksi barang dan jasa (Misno *et al.*, 2020). Sebagai gantinya, pemerintah juga menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) untuk pekerjaan yang memungkinkan bisa dilaksanakan, sehingga masyarakat masih bisa melakukan pekerjaan tanpa harus Work From Office (WFO).

Pendidikan merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi, maka hidup manusia akan menjadi semakin berkualitas. Berkaitan dengan

perekonomian nasional, semakin tinggi kualitas hidup penduduk suatu bangsa, maka akan semakin tinggi juga tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut (Nugroho, 2014). Tingkat pendidikan yang tinggi pada tenaga kerja dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan sebagai bagian dari upaya pembangunan manusia secara nasional yang telah dilakukan disetiap wilayah di seluruh Indonesia. Pembangunan pendidikan merupakan wujud dari proses perubahan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia demi mencapai pemerataan dan kesejahteraan hidup. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimana setiap orang dapat memwujudkan potensi mereka. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu berhak mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk hak atas pendidikan serta kenikmatan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, dengan tujuan meningkatkan mutu hidup dan mencapai kebahagiaan umat manusia.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Sejumlah target telah ditetapkan untuk mencapai peningkatan tersebut, termasuk Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat 2 SD/MI yang mencapai 91,3% pada tahun 2014 dan diharapkan meningkat menjadi 94,8% pada tahun 2019. Angka Partisipasi Kasar (APK) juga diharapkan meningkat dari 111% menjadi 114,1%. Pada tingkat SMP/MTs, APM yang pada tahun 2014 mencapai 79,4% diharapkan meningkat menjadi 82% pada tahun 2019, dengan APK yang naik dari 101,6% menjadi 106,9%. Sementara pada tingkat SMA/MA/SMK, APM yang pada tahun 2014 mencapai 55,3%, diharapkan meningkat menjadi 67,5% pada tahun 2019, dengan APK yang naik dari 79,2% menjadi 91,6%.

Pendidikan di Indonesia sejauh ini hanya mengadopsi *trend* yang sedang berkembang di negara lain, yaitu hanya bercermin dari negara-negara yang

sudah maju, misalnya Amerika, Australia, dan Inggris. Pendidikan karakter, kearifan lokal, dan kewirausahaan yang diintegrasikan, merupakan salah satu program yang gagal atau kurang efektif, karena aspek yang berperan penting yaitu pendidikan di dalam keluarga dan masyarakat belum bisa sejalan dan seimbang. Menurut pendapat Todaro & Smith (2000) sistem pendidikan di negara berkembang pada dasarnya belum mementingkan aspek pemerataan (*equality*), dalam arti anak-anak dari keluarga miskin sangat terbatas dalam memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan program pendidikan dalam semua tingkatan pendidikan, dibandingkan dengan anak dari keluarga yang berkecukupan. Sehingga dalam pelaksanaan pencapaian pendidikan masih terjadi ketidakmerataan antara satu daerah dengan daerah yang lain atau yang disebut dengan ketimpangan pendidikan.

Ketimpangan pendidikan merupakan suatu kondisi ketidakmerataan dalam distribusi pendidikan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Ketimpangan pendidikan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan akses terhadap jenjang pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan menjamin perbaikan yang terus berlangsung dalam tingkat teknologi yang digunakan oleh masyarakat (Atmanti, 2005). Hasil penelitian Nur (2018) menunjukkan ketimpangan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat ketimpangan yang ada di suatu wilayah maka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut akan semakin menurun. Artinya pembangunan pendidikan harus merata tanpa adanya unsur perbedaan, agar masyarakat dapat menikmati pendidikan yang layak dan bermutu.

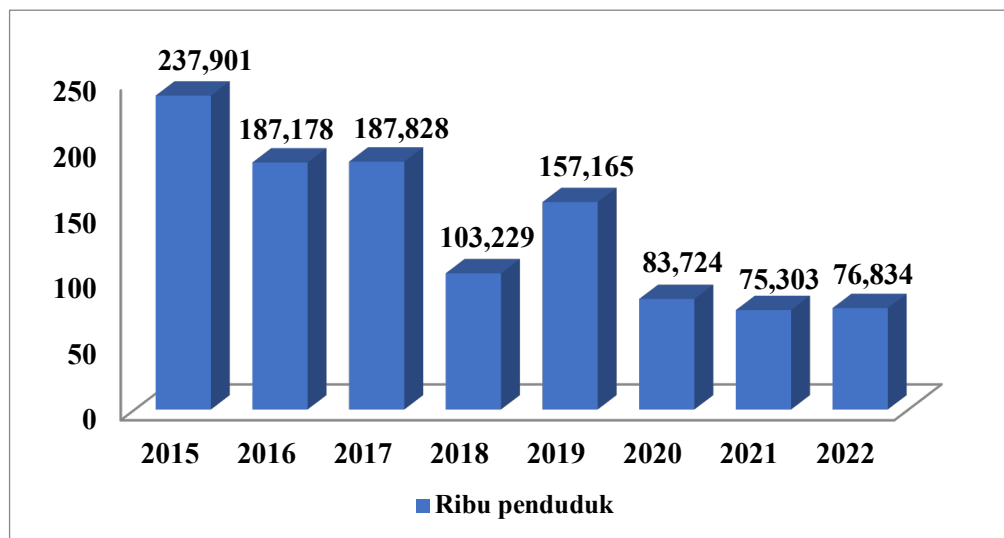
Peningkatan mutu pendidikan merupakan langkah awal yang diambil dalam strategi perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Investasi dalam sektor pendidikan telah terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang mampu mempengaruhi perkembangan suatu negara baik di sektor ekonomi, politik, sosial, budaya maupun hukum. Tingkat dan kualitas

pendidikan menjadi penentu utama arah pertumbuhan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, pada kenyataan dapat di lihat bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan sekolah dasar, terlebih sampai ke perguruan tinggi. Dalam hal ini, pemerataan pendidikan harus diutamakan dalam usaha peningkatan pendidikan di dalam suatu negara atau wilayah agar tidak terjadi ketimpangan pendidikan antar daerah .

Pencapaian pendidikan dalam suatu negara menjadi kunci penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan negara tersebut. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator pendidikan yang dapat dievaluasi untuk mengukur pencapaian pendidikan secara keseluruhan, sementara distribusi pendidikan dapat diukur melalui indeks ketimpangan pendidikan untuk menilai sejauh mana ketersediaan modal manusia di suatu daerah. Oleh karena itu , peningkatan sumber daya manusia menjadi faktor penentu kualitas pendidikan suatu daerah. Sejalan dengan pendapat Wahyuni & Monika, (2016) bahwa kualitas pendidikan menentukan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu menurunkan ketimpangan pendidikan.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu Program Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Salah satu tujuan PIP adalah menghindari terjadinya peserta didik yang putus sekolah. Bantuan PIP berupa uang tunai yang diberikan langsung kepada peserta didik dan atau orang tua/walinya, diharapkan mencegah peserta didik putus sekolah. Dengan bantuan PIP, peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin dapat membeli peralatan dan perlengkapan sekolah, termasuk biaya transportasi. Sampai tahun 2021, bantuan PIP Dikdasmen telah disalurkan pada 18 juta lebih siswa di jenjang SD sampai SMA/SMK dan Pendidikan nonformal). Namun, melalui kehadiran PIP yang dimulai tahun 2014 dan merupakan penyempurnaan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2013 lalu memperlihatkan adanya *trend* semakin menurunnya jumlah peserta didik yang putus sekolah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022).

Meskipun pemerintah telah membuat Program Indonesia Pintar (PIP), namun hasil yang diperoleh masih belum optimal dalam hal mengatasi permasalahan pendidikan sampai saat ini. Berdasarkan data dari Kemendikbudristek yang lain masih terdapat banyak penduduk yang tidak bersekolah walaupun sudah memasuki usia sekolah. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan penduduk tidak sekolah, diantaranya yaitu rendahnya minat penduduk untuk sekolah, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor komunikasi keluarga, faktor sosial sampai faktor kesehatan.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1. Jumlah Penduduk Tidak Sekolah di Indonesia Tahun 2015-2022

Berdasarkan Gambar 1 diatas jumlah penduduk tidak sekolah pada tahun 2015-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 jumlah penduduk tidak/belum sekolah sebanyak 237,901 ribu penduduk yang merupakan jumlah tertinggi dari penduduk tidak/belum sekolah selama periode tahun 2015-2022. Trend penurunan jumlah penduduk tidak sekolah terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk tidak sekolah 103,229 ribu penduduk. Namun pada tahun 2019 jumlah penduduk tidak sekolah mengalami kenaikan menjadi 157,165 ribu penduduk. Terjadi penurunan drastis ditahun selanjutnya yaitu pada tahun 2020-2022 dengan jumlah penduduk tidak sekolah sebesar 83,724 ribu penduduk tahun 2020, 75.303 ribu penduduk tahun 2021, dan 76.834 ribu penduduk tahun 2022 . Berdasarkan Survey Ekonomi Nasional (BPS, Susenas



2021), 76% keluarga mengatakan bahwa anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Sebagian besar (67,0%) di antaranya tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara sisanya (8,7%) harus mencari nafkah.

Selain sektor perekonomian Indonesia, sektor pendidikan di Indonesia juga ikut terkena dampak dari wabah Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020. Dilihat dari gambar di atas, pada tahun 2020-2022 tidak terjadi adanya kenaikan atau penurunan jumlah penduduk tidak sekolah secara signifikan. Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan kegiatan bersekolah harus diliburkan dan mengganti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan sistem dalam jaringan (daring). Penerapan sistem daring ini merupakan kebijakan WFH yang diterapkan oleh pemerintah untuk semua kegiatan yang memiliki aktivitas dalam bentuk kerumunan, perkumpulan atau pertemuan.

Dampak dari penerapan sistem daring untuk kegiatan pembelajaran memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari penerapan sistem daring yaitu masyarakat dituntut untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sehingga mampu meningkatkan kemampuan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Selain itu, pembelajaran daring dapat mempermudah orang tua dalam mengawasi perkembangan belajar pada anaknya. Namun terdapat beberapa dampak negatif dari pembelajaran sistem daring, yaitu terdapat beberapa kendala dalam proses pembelajaran sistem daring seperti sarana penunjang untuk pembelajaran daring yang kurang dikarenakan kondisi masyarakat yang tidak semua memiliki teknologi untuk mendukung proses pembelajaran seperti *handphone* dan laptop.

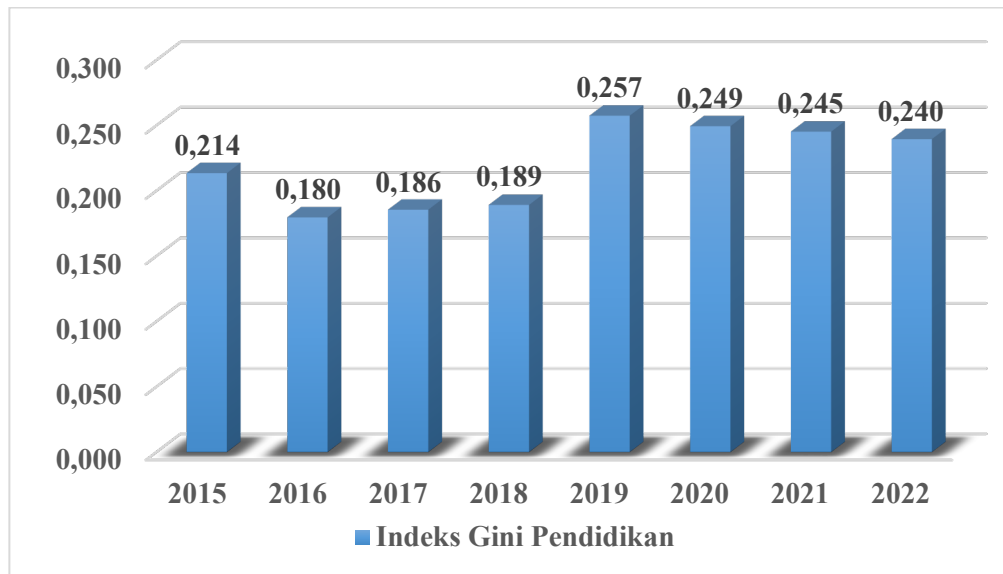
Kondisi wilayah juga dapat mengakibatkan terkendala proses pembelajaran dikarenakan jaringan yang dimiliki beberapa wilayah kurang mendukung. Menurut Santosa (2020) terdapat dua masalah dalam penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ), yaitu keterbatasan akses terhadap koneksi internet yang stabil dan kemampuan tenaga pengajar yang kesulitan beradaptasi dengan metode pembelajaran tersebut. Secara umum, metode pembelajaran jarak jauh memberikan beban lebih kepada tenaga pengajar (guru) karena

merupakan pengalaman pertama bagi mereka melakukan pembelajaran secara daring.

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan adanya ketimpangan akses pendidikan dalam proses pembelajaran. Hal ini didukung berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa pada Februari 2020 jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 143,26 Juta atau sekitar 55 %. Artinya masih ada 45 % yang belum tersentuh internet. Pandemi Covid-19 memberi dampak terhadap peningkatan resiko anak putus sekolah di Indonesia

Menurut Thomas *et al.* (2001) indikator pendidikan kurang efisien dalam menggambarkan ketimpangan pendidikan dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, perlu ukuran ketimpangan pendidikan yang lain seperti indeks gini pendidikan untuk melengkapi indikator kesejahteraan.. Indeks Gini pendidikan yang mengukur rasio rata-rata capaian tahun sekolah dari semua penduduk (Thomas *et al.*, 2001). Menurut pendapat Todaro & Smith (2011) terdapat kategori untuk ketimpangan pendidikan berdasarkan Indeks Gini Pendidikan yaitu (1) nilai indeks 0,71 ke atas merupakan kategori wilayah dengan ketimpangan sangat tinggi, (2) nilai indeks 0,5- 0,70 merupakan kategori wilayah dengan ketimpangan tinggi, (3) nilai indeks 0,36-0,49 merupakan kategori wilayah dengan ketimpangan sedang, (4) nilai indeks 0,21-0,35 merupakan kategori wilayah dengan ketimpangan rendah, dan (5) nilai indeks 0,20 ke bawah merupakan kategori wilayah dengan ketimpangan sangat rendah.

Thomas *et al.* (2001) juga memelopori penghitungan ukuran ketimpangan pendidikan berdasarkan capaian pendidikan yaitu dengan mengetahui nilai koefisien gini pendidikan. Ukuran ini dianggap cukup efektif untuk mengukur ketimpangan pendidikan secara relatif. Selain pencapaian pendidikan, Gini pendidikan juga dapat dihitung berdasarkan data pendaftaran dan total pendanaan pendidikan.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Gambar 2. Indeks Gini Pendidikan di Indonesia tahun 2015-2022

Gambar 2 menunjukkan nilai indeks gini pendidikan di Indonesia untuk mengukur tingkat ketimpangan pendidikan di Indonesia mengalami fluktuasi. Angka ketimpangan pendidikan penduduk di Indonesia pada tahun 2015 dengan nilai indeks gini pendidikan 0,214 dan 0,240 pada tahun 2022. Angka tersebut dapat dikategorikan ke dalam kategori ketimpangan yang rendah. Berdasarkan data tersebut, kondisi ketimpangan pendidikan di 2016 merupakan ketimpangan terendah dengan nilai indeks gini pendidikan 0,180 dan tahun 2019 merupakan tahun dengan nilai indeks gini pendidikan tertinggi yaitu 0,257.

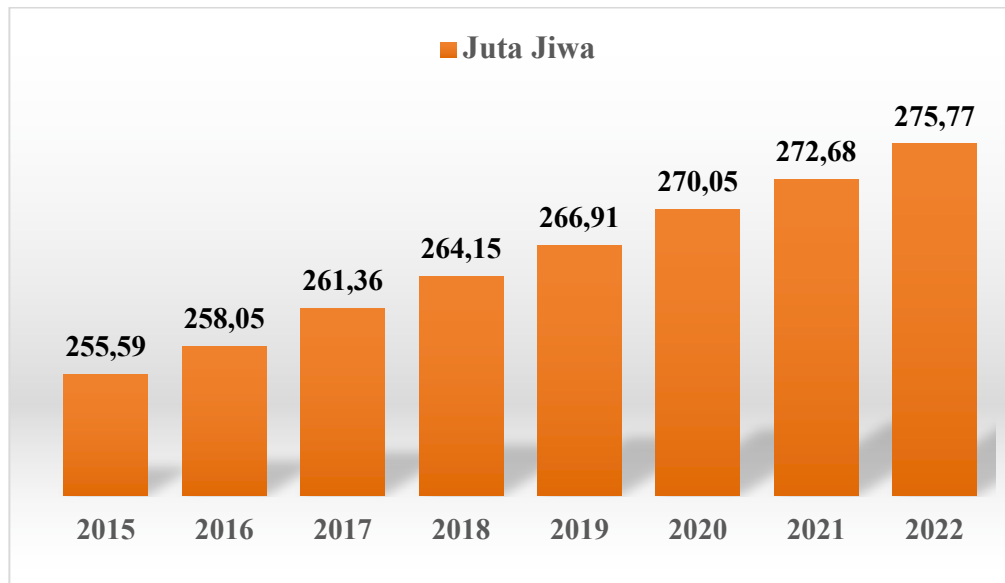
Berdasarkan indeks gini pendidikan pada tahun 2015-2022 dapat disimpulkan bahwa kondisi ketimpangan berada dalam kategori rendah, namun nilai indeks gini pendidikan dari tahun 2019-2022 cenderung lebih tinggi dari nilai indeks tahun sebelumnya, dikarenakan tahun tersebut terdampak adanya wabah Covid-19. Kondisi tersebut dikarenakan semua sektor pembangunan salah satunya sektor pendidikan mengalami pembatasan berskala besar untuk mencegah penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, peningkatan dan penurunan ketimpangan pendidikan di Indonesia masih belum mampu menurunkan

permasalahan ekonomi di tingkat nasional (BPS, 2010-2017). Hal ini didukung dengan pernyataan *United Nations Development Programme* (2016) bahwa ketimpangan pendidikan yang terjadi di negara Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan tingkat ketimpangan pendidikan tertinggi di Asia Tenggara.

Setelah mengetahui angka indeks pendidikan di Indonesia, diharapkan pemerintah mampu mengklasifikasi ketimpangan pendidikan tinggi, sedang, dan kecil sehingga dapat mengatasi ketimpangan sehingga mampu mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab ketimpangan di daerah tersebut. Tingginya tingkat ketimpangan pendidikan di suatu wilayah menunjukkan hanya jenjang pendidikan tertentu yang dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat.

Selain pendidikan, jumlah penduduk memegang peran penting dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Penduduk merupakan sekumpulan masyarakat yang menempati suatu daerah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan (*income per capita*) suatu negara yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut (Subri, 2003). Menurut penelitian Saputra *et al.* (2015) menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendidikan.

Semakin tinggi jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang tinggi, maka tingkat produktivitas wilayah tersebut akan meningkat, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin bertambah tenaga kerja yang harus diserap. Oleh karena itu apabila jumlah penduduk semakin bertambah, maka banyak yang harus direncanakan untuk mengatasi keadaan tersebut.



Sumber : Badan Pusat Statistik ( BPS)

Gambar 3. Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2015-2022

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa , Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun pada periode tahun 2015-2022. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 255,58 juta jiwa. Jumlah tersebut kemudian mengalami kenaikan menjadi 258,49 juta jiwa pada tahun 2016. Jumlah penduduk Indonesia kembali mengalami kenaikan pada pertengahan 2017 menjadi 261,35 juta jiwa. Lalu, jumlah penduduk Indonesia menjadi 264,16 juta pada tahun 2018 naik dan menjadi 266,91 juta jiwa pada pertengahan 2019. Pada pertengahan 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270,20 juta jiwa naik . Jumlah kembali naik menjadi 272,68 juta jiwa pada tahun 2021 naik 1,22% dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk Indonesia dilaporkan kembali mengalami peningkatan menjadi 275,77 juta jiwa hingga pertengahan 2022. Jumlah tersebut naik 1,13% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Data tersebut menunjukkan laju pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2015-2022 mengalami kenaikan signifikan. Dilihat dari data gambar di atas, jumlah penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2020-2022 yang di mana tahun tersebut terdampak wabah Covid-19. Meskipun tingkat resiko kematian

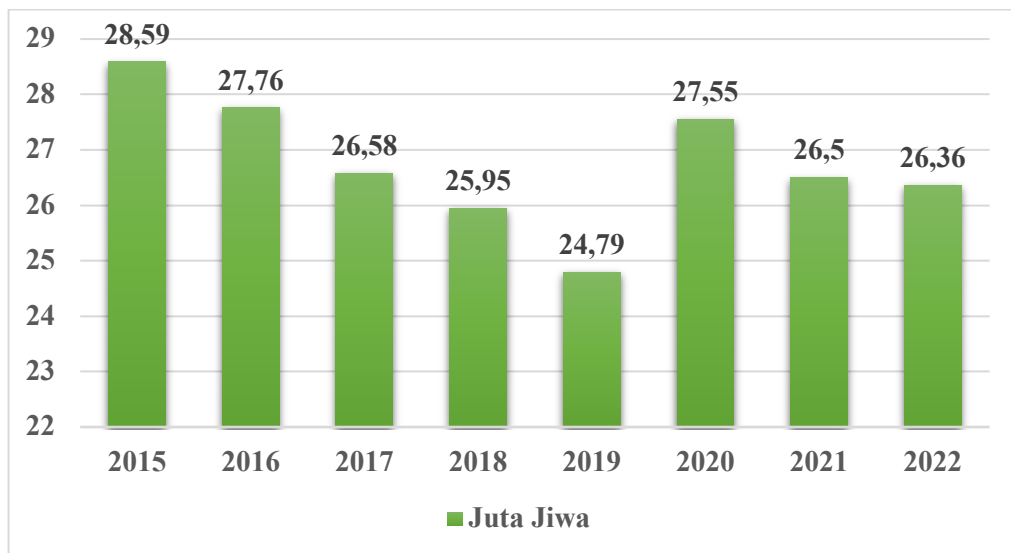
akibat penyakit Covid-19 tinggi, namun dengan adanya kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah agar penularan penyakit Covid-19 dapat dicegah, namun akibat dari kebijakan tersebut angka kelahiran atau fertilitas akan meningkat ditahun tersebut. Selain itu meningkatnya angka kelahiran dipengaruhi oleh sektor ekonomi yang tidak stabil akibat dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan PHK 1,2 juta lebih pekerja dari sektor formal dan informal sehingga bertambah angka pengangguran.

Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap berbagai sektor pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kemiskinan. Dengan mengetahui masalah yang dihadapi dalam mengelola jumlah penduduk, dapat diambil kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam permasalahan pendidikan, ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan menjadi hal yang penting.

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks di dalam suatu negara, karena tidak hanya terkait dengan rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, melainkan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.. Menurut Zakaria (2018) kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: (1) Kemiskinan relatif yaitu kondisi di mana seseorang meskipun memiliki tingkat penghasilan di atas garis kemiskinan, namun masih dianggap miskin karena kemampuannya masih berada di bawah rata-rata masyarakat sekitarnya, (2) Kemiskinan *cultural* berkaitan erat dengan perilaku individu atau kelompok masyarakat yang menolak untuk meningkatkan kualitas hidupnya, meskipun ada upaya dari pihak lain untuk membantu, (3) Kemiskinan absolut yaitu suatu keadaan di mana sejumlah penduduk tidak memiliki akses atau sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

Tingkat kemiskinan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengategorikan apakah suatu individu atau keluarga dianggap miskin atau tidak. Tingkat kemiskinan

dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk tingkat pendidikan, ketersediaan akses terhadap layanan kesehatan, akses terhadap lapangan kerja, dan tingkat penghasilan. Pendidikan yang rendah dapat menghambat peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga berdampak pada tingkat kemiskinan. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat memicu munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, seperti peningkatan berbagai fasilitas sosial, peningkatan persaingan untuk memperoleh pekerjaan dan usaha, hingga persoalan mahal dan sulitnya mengakses pendidikan layak yang akan berdampak pada peningkatan kemiskinan.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 4. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2022

Berdasarkan Gambar 4, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) cenderung mengalami fluktuasi. Dari data BPS tersebut jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 mencapai 28,59 (11,22%) juta jiwa bertambah 0,86 juta jiwa dari tahun sebelumnya (naik 0,26%). Tahun 2015 merupakan tahun tertinggi untuk jumlah penduduk miskinnya. Kemudian jumlah penduduk miskin mengalami penurunan hingga tahun 2019 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 24,79 juta jiwa menurun 0,88 juta jiwa dari tahun 2018 (menurun 0,44%). Kemudian menurun kembali pada tahun 2021

dan 2022 sebesar 26,50 dan 26,36 juta jiwa. Kondisi tersebut tak lepas dari adanya pengaruh dari pandemi Covid-19 yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia yang terlihat di tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan sebesar 0,97% dari tahun 2019 dengan jumlah penduduk miskin 27,55 juta jiwa yang merupakan efek dari sedang tingginya kasus Covid-19 saat itu. Hal tersebut diakibatkan dari menurunnya pendapatan penduduk karena kegiatan perekonomian yang tidak berjalan bahkan terpaksa berhenti.

Menurut penelitian Saputra *et al.* (2015) tingkat kemiskinan secara signifikan berhubungan positif dengan ketimpangan pendidikan. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar pula tingkat ketimpangan pendidikan di suatu daerah. Oleh karena itu, peningkatan kemiskinan dalam masyarakat dapat menyebabkan penurunan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam hal pendidikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan pendidikan.

Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia melibatkan alokasi dana untuk meningkatkan potensi individu serta memberikan kesempatan untuk memperoleh penghasilan selama proses pembelajaran (Atmanti, 2005). Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dianggap sebagai bentuk investasi pemerintah dalam pembangunan mutu pendidikan. Ketika terjadi ketimpangan dalam bidang pendidikan, investasi pemerintah menjadi faktor kunci untuk mengurangi disparitas tersebut. Menurut Sumarsono (2009) berpendapat bahwa pemerintah dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui besarnya pengeluaran pemerintah terhadap bidang pendidikan dan kesehatan. Usaha pemerintah dalam memajukan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang mengatur besarnya alokasi anggaran bidang pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah.



Pada tahun 2019, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pendanaan pendidikan turun 10,2% menjadi Rp 36 triliun dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut setara dengan 22,07% anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat senilai Rp 163,1 triliun atau setara 7,31% dari total anggaran pendidikan tahun ini Rp 492,5 triliun. Dampak dari penurunan pendanaan di bidang pendidikan alah satunya dapat memperlambat pembangunan pendidikan di Indonesia. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengalokasikan anggaran pada APBD kota dan kabupaten untuk sektor pendidikan hanya sekitar 30% dari total anggaran pendidikan. Kurang dari Anggaran APBD tersebut disediakan untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun. Sisa anggaran dialokasikan untuk program-program pendidikan lainnya yang kurang tepat sasaran terkait dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan gratis di semua tingkat pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.

Dampak pandemi Covid-19 turut memengaruhi tingkat pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengalami kenaikan akibat pandemi Covid-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengumumkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengalokasikan dana sebesar Rp3,6 Triliun untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non-PNS di seluruh Indonesia, dengan sasaran lebih dari 2 juta individu. Bantuan Subsidi Upah ini mencapai Rp1,8 juta per individu dan disertai dengan proses pencairan yang disederhanakan. Selain itu, Kemendikbud juga mengalokasikan dana sebesar Rp5,5 Triliun untuk Bantuan Kuota Data Internet kepada pendidik dan peserta didik di seluruh Indonesia. Program ini memberikan kuota data internet sebesar 100 GB, dengan alokasi 50 GB per bulan, yang dapat dimanfaatkan oleh semua jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bustomi (2012) dan Saputra *et al.* (2015) menyimpulkan bahwa pengaruh pengeluaran pemerintah atas pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan

pendidikan. Berdasarkan kajian teoritis bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, maka itu akan mengurangi ketimpangan pendidikan di suatu wilayah.

Selain faktor pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, salah satu faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan di Indonesia yaitu rendahnya pengeluaran pendidikan dari rumah tangga untuk pembiayaan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan menunjukkan kemampuan suatu rumah tangga untuk membiayai pendidikan anaknya. Selain itu, dengan adanya pandemi Covid 19 juga berdampak untuk ekonomi rumah tangga. Turunnya konsumsi rumah tangga yang berakibat pada laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang merosot menjadi 2,3% hingga -0.4% (BPS,2020). Angka tersebut jauh di bawah asumsi APBN 2020 yang mencapai 5,3%. Sektor rumah tangga kan mengalami penurunan konsumsi yang cukup besar dikarenakan tidak adanya kegiatan ekonomi sehingga turun cukup tajam dari 3,22 % sampai 1,60% (Warta Ekonomi, 2020)

Menurut penelitian Sholikhah *et al.* (2014) pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendidikan. Menurut Todaro & Smith (2011), semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan yang di tempuh oleh seseorang dapat mengurangi ketimpangan pendidikan di suatu wilayah. Tingkat pengeluaran biaya pendidikan oleh rumah tangga di suatu wilayah juga mencerminkan seberapa besar investasi dalam modal manusia dalam masyarakat tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendidikan di Indonesia yang berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan sebuah penelitian terkait dengan hal tersebut . Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel , yaitu variabel independen, variabel dependen , dan variabel anteseden. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (bebas). Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel

anteseden adalah variabel yang muncul sebelum variabel bebas dan variabel terikat yang diteliti dan dapat membantu menjelaskan hubungan keduanya untuk lebih dalam mengetahui hubungan tentang fenomena yang sedang diteliti.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia
2. Menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia
3. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia
4. Menganalisis pengaruh pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan terhadap ketimpangan pendidikan di Indonesia
5. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

#### **D. Batasan Penelitian**

Tujuan adanya pembatasan penelitian yaitu agar penelitian terfokus pada variabel yang diteliti sehingga tidak menyebabkan kesulitan dalam pemahaman yang sudah disesuaikan dengan penelitian ini. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Tahun 2015-2022)” dengan variabel antededen yaitu ketimpangan pendidikan dan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel independennya yaitu jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistika (BPS), Kemendikbudristek, dan Dirjen Kemenkeu Indonesia pada tahun 2015-2022.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis :**

###### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan dan upaya untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan.

###### **b. Bagi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi BKKBN untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sehingga membentuk masyarakat yang berkualitas.

###### **c. Bagi Kementerian Sosial**

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi kementerian sosial untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemiskinan yang terjadi

di Indonesia dan melaksanakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penelitian ini hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap kementerian keuangan republik Indonesia dalam membuat kebijakan-kebijakan dan merealisasikan anggaran-anggaran untuk kebutuhan negara dengan optimal.